



# **RANWAL RENCANA KERJA**

## **TAHUN 2025**



**KECAMATAN DENPASAR SELATAN**  
**KOTA DENPASAR**  
**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tersusunnya Rencana Kerja (Ranwal Renja) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025. Kami menyadari bahwa materi Rencana Kerja (Ranwal Renja) ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan sebelumnya maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Terimakasih atas kerjasama semua pihak sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Selatan dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Selatan, pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya Rencana Kerja (Ranwal Renja) Tahun 2025 ini. Kami menyadari bahwa penyusunan Ranwal Renja ini masih belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan, saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak serta OPD terkait pada Pemerintah Kota Denpasar guna penyempurnaan Penyusun Ranwal Renja dimasa mendatang.

Denpasar, 08 Desember 2023  
Camat Denpasar Selatan



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II</b> EVALUASI PELAKSANAAN RANWAL RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Ranwal Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renta PD	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD.....	12
2.2.1 Capaian Kinerja Keuangan .....	13
2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	13
<b>BAB III</b> TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Ranwal Renja Perangkat Daerah.....	20
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	20
<b>BAB IV</b> RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	26
<b>BAB V</b> PENUTUP.....	49
.	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2025 ini merupakan penjabaran Awal daripada rencana strategis (renstra) tahun 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, Ranwal Renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan rencana kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana kerja. Adapun dalam tahap penyusunan rancangan Ranwal Renja ini berdasar pada rancangan awal RKPD dan rencana strategis (renstra) tahun 2021-2026 Kecamatan Denpasar Selatan.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini di dalamnya telah dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2021 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2022. Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis Kecamatan Denpasar Selatan, baik di Kota Denpasar, Provinsi Bali maupun Nasional.

Dimana dalam tahun 2021 adanya pandemic virus corona 19 (covid -19), yang menyebabkan lumpuh nya sector pariwisata tentu saja hal tersebut sudah tentu berimbas kepada semua stekholder yang mengandalkan sektor pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Denpasar Selatan dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan perubahan struktur sesuai dengan Visi dan Misi Kota Denpasar melalui Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan, dengan Misinya ; Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali; Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan local; peningkatan pelayanan public yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*);

peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan; dan penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan tri Hita Karana, yang mana reformasi pada sektor ekonomi pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana Strategis yang mengarahkan semua unsur yang mempengaruhi Lingkungan Internal (kekuatan dan kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) berdasarkan hal tersebut, disusun Rencana Kerja (Ranwal Renja) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Ranwal Renja berpedoman pada :

1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
  10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah di rubah dengan Permendagri No 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;
  13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Menpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 8 Tahun 2016), tambahan lembaran daerah Kota Denpasar Nomor 8);
  18. Peraturan Walikota Denpasar nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Selatan dimaksud sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan prinsip-prinsip *good governance* (penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme) sesuai dengan Visi dan Misi.

Penyusunan rancangan rencana kerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2025, yang merupakan penjabaran tahun pertama dari pada Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2021-2026. Sedangkan tujuannya adalah sebagai gambaran awal apa yang akan dilakukan oleh Kecamatan Denpasar Selatan pada Tahun 2025 dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Kecamatan Denpasar Selatan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### Bab II Hasil Evaluasi Ranwal Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Ranwal Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal SKPD

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Ranwal Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

### Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

### Bab V. Penutup

### Lampiran

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RANWAL RENJA PD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Ranwal Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Ranwal Renja Perangkat Daerah, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi Ranwal Renja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Ranwal Renja Kecamatan Kecamatan Denpasar Selatan tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Ranwal Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023  
Kota Denpasar

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Ranwal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Ranwal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Ranwal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
7	01	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	16,855,020,210	18,747,198,481	21,322,769,383	14,310,769,413	67%	24,593,265,510	57,651,233,404	
7	01	01	2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	16,855,020,210	10,527,117,152	11,087,695,301	7,970,646,337	72%	13,895,572,291	32,393,335,780	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	16,855,020,210	10,524,117,152	11,084,695,301	7,969,146,337	72%	13,895,572,291	32,388,835,780
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	3,000,000	3,000,000	1,500,000	50%	-	4,500,000
7	01	01	2.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	99,825,000	0	0	-	0%	-	0%
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan ASN	99,825,000	0	0	0	0	-	0%
7	01	01	2.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1,539,449,292	819,279,859	1,645,377,816	1,062,674,308	65%	1,316,585,000	3,198,539,167

*Ranwal Renja Kecamatan Denpasar Selatan 2025*

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,212,235	21,357,739.00	24,324,839.00	20,657,000	85%	25,015,500	67,030,239	222%
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,164,554,229	567,919,720.00	1,334,040,984.00	854,609,958	64%	976,893,000	2,399,422,678	206%
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	0%	-	-	0%
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	0%	-	-	0%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	213,156,070	149,098,400.00	199,649,243.00	127,251,350	64%	239,436,500	515,786,250	242%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	131,526,758	80,904,000.00	87,362,750.00	60,156,000	69%	75,240,000	216,300,000	164%
7	01	01	2.07		<b>Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah</b>	<b>730,109,402</b>	<b>79,176,000</b>	<b>59,007,482</b>	<b>51,300,000</b>	<b>87%</b>	<b>196,779,000</b>	<b>327,255,000</b>	<b>45%</b>
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubel yang diadakan	-	0	0	-	0%	-	-	0%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	-	0	0	-	0%	-	-	0%
7	01	01	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang siap Pakai	-	0	0	0	0	-	-	0%
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang siap Pakai	730,109,402	79,176,000	59,007,482	51,300,000	87%	196,779,000	327,255,000	45%
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7,953,153,705</b>	<b>6,614,217,464</b>	<b>6,942,254,286</b>	<b>4,600,530,112</b>	<b>66%</b>	<b>7,992,158,844</b>	<b>19,206,906,420</b>	<b>242%</b>
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	577,920,200	298,246,143	514,826,592	236,594,383	46%	520,010,400	1,054,850,926	183%
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300,761,332	172,522,850	61,781,456	25,475,000	41%	43,743,000	241,740,850	80%

7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7,074,472,173	6,143,448,471	6,365,646,238	4,338,460,729	68%	7,428,405,444	17,910,314,644	253%
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah</b>	<b>2,896,672,836</b>	<b>707,408,006</b>	<b>1,588,434,498</b>	<b>625,618,656</b>	<b>39%</b>	<b>1,192,170,375</b>	<b>2,525,197,037</b>	<b>87%</b>
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	83,453,700	44,283,300	53,722,550	30,809,000	57%	45,860,000	120,952,300	145%
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	789,155,334	423,640,280	595,363,303	297,026,000	50%	574,061,000	1,294,727,280	164%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11,646,250	8,670,000	6,194,000	1,500,000	24%	3,540,000	13,710,000	118%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,434,626,096	35,608,526	419,765,865	167,386,556	40%	231,139,375	434,134,457	30%
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	577,791,456	195,205,900	513,388,780	128,897,100	25%	337,570,000	<b>661,673,000</b>	115%
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat</b>	<b>1,222,669,005</b>	<b>189,889,900</b>	<b>258,541,398</b>	<b>223,247,415</b>	<b>86%</b>	<b>361,069,250</b>	<b>774,206,565</b>	<b>63%</b>
7	01	02	2.01		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Terlaksananya Koordinasi di tingkat Kecamatan</i>	<i>1,222,669,005</i>	<i>145,390,400</i>	<i>203,887,880</i>	<i>170,906,165</i>	<i>84%</i>	<i>214,763,250</i>	<i>531,059,815</i>	<i>43%</i>

7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	60,308,675	24,679,400	39,883,131	35,908,131	90%	48,350,250	108,937,781	181%
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Lomba PSN, PKK dan posyandu	1,162,360,330	120,711,000	164,004,749	134,998,034	82%	166,413,000	422,122,034	36%
7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<i>Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat</i>	<b>69,212,000</b>	<b>44,499,500</b>	<b>54,653,518</b>	<b>52,341,250</b>	<b>96%</b>	<b>146,306,000</b>	<b>243,146,750</b>	<b>351%</b>
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	69,212,000	44,499,500	54,653,518	52,341,250	96%	146,306,000	243,146,750	351%
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<i>Percentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah</i>	<b>6,752,241,356</b>	<b>6,213,405,420</b>	<b>4,975,479,703</b>	<b>2,935,828,863</b>	<b>59%</b>	<b>4,610,754,335</b>	<b>13,759,988,618</b>	<b>204%</b>
7	01	03	2.02		<b>Pemberdayaan Kelurahan</b>	<i>Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan</i>	<b>6,752,241,356</b>	<b>6,213,405,420</b>	<b>4,975,479,703</b>	<b>2,935,828,863</b>	<b>59%</b>	<b>4,610,754,335</b>	<b>13,759,988,618</b>	<b>204%</b>
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana di Kelurahan	16,705,248	11,175,500.00	14,129,290.00	0	0%	13,954,350	25,129,850	150%
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana di Kelurahan	2,751,443,200	2,038,332,400.00	2,072,267,503.00	1,055,907,113	51%	2,158,667,485	5,252,906,998	191%
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3,984,092,908	4,163,897,520.00	2,889,082,910.00	1,879,921,750	65%	2,438,132,500	8,481,951,770	213%
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<i>Percentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<b>1,025,138,862</b>	<b>657,157,450</b>	<b>747,193,911</b>	<b>414,567,850</b>	<b>55%</b>	<b>1,217,667,750</b>	<b>2,289,393,050</b>	<b>223%</b>
7	01	04	2.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</b>	<i>Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</i>	<b>1,025,138,862</b>	<b>657,157,450</b>	<b>747,193,911</b>	<b>414,567,850</b>	<b>55%</b>	<b>1,217,667,750</b>	<b>2,289,393,050</b>	<b>223%</b>

7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pendataan Penduduk yang dilaksanakan, Jumlah Patroli Lingkungan yang dilaksanakan	1,025,138,862	657,157,450	747,193,911	414,567,850	55%	1,217,667,750	2,289,393,050	223%
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Percentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	160,052,750	99,262,500	159,924,647	131,016,103	82%	187,978,150	418,256,753	261%
7	01	05	2.01		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan</i>	160,052,750	99,262,500	159,924,647	131,016,103	0	187,978,150	418,256,753	261%
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Kegiatan Hut RI dan Hut Kota Denpasar	126,777,750	81,762,500	129,774,647	119,121,103	0	160,978,150	361,861,753	285%
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi antar Kecamatan	33,275,000	17,500,000	30,150,000	11,895,000	0	27,000,000	56,395,000	169%
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Percentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	78,197,581	17,925,000	16,050,000	2,775,000	17%	15,825,000	36,525,000	47%
7	01	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa</i>	78,197,581	17,925,000	16,050,000	2,775,000	17%	15,825,000	36,525,000	47%
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Evaluasi RAPBDes	78,197,581	17,925,000	16,050,000	2,775,000	17%	15,825,000	36,525,000	47%

## 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Denpasar Selatan merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tugas-tugas Camat dan tidak ada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan standar pelayanan minimal tertentu/lainnya selain ketentuan tentang Indikator Kinerja Utama yang dimiliki.

Kecamatan Denpasar Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016-2021 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Selatan. Pencapaian IKU Kecamatan Denpasar Selatan tersaji dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Capaian IKU Kecamatan Denpasar Selatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	85%	85%

### 2.2.1 Capaian Kinerja Keuangan

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dalam Tahun Anggaran 2022 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1  
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	27.393.263.243	25.924.838.751

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kecamatan Denpasar Selatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi Lainnya.

Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2022, Kecamatan Denpasar Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

Pertumbuhan wilayah yang sangat dinamis dan cepat, tetapi dengan keterbatasan ketersediaan lahan non pertanian menjadikan permasalahan yang kompleks di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Sehingga alih lahan pertanian menjadi non pertanian yang nantinya dipergunakan sebagai area perumahan pemukiman baru. Faktor wilayah Kecamatan Denpasar Selatan sebagai wilayah aglomerasi perkotaan menjadikan daya tarik tersendiri bagi konsumen perumahan dan kalangan bisnis property. Salah satu upaya dengan permasalahan keterbatasan lahan dengan banyaknya pembangunan. Plus minus adanya hunian vertikal adalah faktor dampak sosial.

A. Kondisi Eksternal dan Internal Dari gambaran umum di atas perlu diungkapkan dengan jelas faktor-faktor penentu keberhasilan. Perumusan faktor-faktor kunci keberhasilan dilakukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur strategis yang dapat memberikan muatan untuk proses pencapaian visi dan misi Kecamatan Denpasar Selatan.

Dengan menggunakan analisis SWOT diperoleh gambaran lingkungan internal dan eksternal guna penetapan kunci-kunci keberhasilan sebagai berikut :

### 1 .Kondisi Internal

#### 1) Potensi yang dimiliki (Kekuatan/Strength)

- Potensi luas wilayah yang merupakan pengembangan area bisnis, jasa dan pendidikan dapat menjadikan penggerak roda perekonomian masyarakat setempat baik dengan usaha dibidang property, kuliner maupun penginapan (kost-kostan dan hotel)
- Kemampuan masyarakat yang tinggi dalam berkreasi dan berinovasi untuk meningkatkan penghasilan dengan berbagai sumber daya yang ada.
- Karakteristik masyarakat yang aspiratif.
- Aspek penyelenggaraan pemerintahan dengan dukungan pegawai yang memadai dan relatif berkualitas di Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- Adanya sumber dana APBD.
- Motivasi kerja pegawai cukup tinggi.
- Jelasnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Denpasar Selatan.

#### 2) Kelemahan (Weakness)

- Pemanfaatan lahan yang berorientasi ekonomi dan cenderung mengabaikan ekosistem/kelestarian lingkungan.
- Dorongan dan kemauan yang masih lemah pada masyarakat dalam upaya meningkatkan penghasilan.
- Jumlah dan kualitas pegawai kurang dibarengi dengan disiplin, upaya pemeliharaan skill (kemampuan & ketampilan) yang kontinyu dalam penyesuaian dengan tuntutan/dinamika masyarakat tentang pelayanan yang lebih baik/prima dari aparatur pemerintah.

- Pengolahan manajemen pemerintah yang belum efektif dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan, sumber daya organisasi (aparat, dana dan peralatan) kurang dapat dimanfaatkan secara efisien, sehingga terjadi tugas dan fungsi yang kurang tertangani.

## 2. Kondisi Eksternal

### a. Peluang (Opportunity)

1. Image tentang kawasan Kecamatan Denpasar Selatan yang merupakan perkembangan kawasan kota menjadikan nilai lahan selalu meningkat.
2. Pemahaman akan kedudukan Kecamatan pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dari masyarakat, desa, instansi sentral terkait di Kecamatan.
3. Partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah mampu memenuhi kebutuhan bersama lingkungan sekitarnya dalam kehidupan masyarakat masih tinggi.

### B. Tantangan (Threats)

1. Belum termanfaatkannya secara optimal potensi sumber daya yang ada baik dengan tujuan ekonomis maupun pelestarian lingkungan.
2. Tuntutan pelayanan publik yang harus selalu lebih baik dari masyarakat, tanpa melihat sumber daya organisasi.
3. Kondisi kesehatan lingkungan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang masih perlu mendapat prioritas dan perhatian.
4. Fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat masih perlu perhatian.

Kondisi Aparatur Keberadaan Pegawai pada Kecamatan Kecamatan Denpasar Selatan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Pegawai sumber daya manusia merupakan salah satu komponen untuk mencapai kesuksesan suatu tujuan. Peran pegawai yang merupakan pemikir, perencana dan pelaksana keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

amat menentukan keberhasilan pencapaian visi, misi, dan kebijakan Pemerintah Kota Denpasar. Sumber daya manusia pada Kecamatan Denpasar Selatan yang ada pada saat ini diberdayakan seoptimal mungkin untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

### C. Permasalahan Pelayanan

Permasalahan pelayanan di Kecamatan Denpasar Selatan diuraikan dalam klasifikasi tiap-tiap Seksi sebagai berikut :

1. Sekretariat Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat antara lain:

- a. Pengelolaan arsip yang belum optimal.
- b. Pengelolaan perpustakaan yang belum optimal
- c. Pengelolaan keuangan yang belum optimal.
- d. Perencanaan yang kurang optimal.
- e. Pengelolaan dokumen kepegawaian yang belum optimal
- f. Perlu data monografi yang valid untuk penentu kebijakan

2. Seksi Pemerintahan

Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemerintahan antara lain:

- a) Masih sering terjadinya konflik konflik pertanahan.
- b) Meningkatnya pemanfaatan tanah yang belum berizin.
- c) Masih lemahnya pemahaman perangkat Kelurahan tentang administrasi pemerintahan.
- e) Belum maksimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan Desa.
- f) Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban antara lain :

- a) Lemahnya pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
- b) Lemahnya penertiban PKL
- d) Lemahnya pemahaman tentang peraturan per Undang-Undangan.
- e) Tindak kriminal cenderung meningkat
- f) Kesadaran masyarakat tentang hukum masih rendah.
- g) Pengetahuan masyarakat tentang antisipasi bencana masih rendah.

#### 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat antara lain :

- a) Belum tercipta iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif sebagai tolok ukur kemampuan ekonomi masyarakat.
- b) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- c) Terbatasnya pemberian stimulant pembangunan Desa dan Dusun.
- d) Belum optimalnya potensi daerah yang harus dikelola.
- e) Data kemiskinan yang kurang valid.
- f) Kurang optimalnya penggunaan bantuan pemberdayaan masyarakat.
- g) Penyusunan Siklus tahunan Desa dan APBDes tidak tepat waktu.
- h) Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan Desa.
- i) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pembangunan desa

#### 5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesejahteraan Masyarakat antara lain :

- a) Kurangnya peranserta perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
- b) Belum tertanganinya masalah-masalah sosial masyarakat.
- c) Penanganan kesehatan masyarakat belum optimal.
- d) Perlu pengembangan kesenian di masyarakat.
- e) Belum optimalnya pelestarian adat budaya dan tradisi masyarakat

## 6. Seksi Pelayanan Umum

Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Pelayanan Umum antara lain:

- a) Masih lemahnya validitas data kependudukan.
- b) Lemahnya pemahaman mempunyai KTP dan KK
- c) Semakin tingginya pelayanan publik yang harus ditangani.
- d) Peningkatan jumlah penduduk dan masuk penduduk
- e) Jaringan perekaman data SIAK yang sering terganggu.
- f) Kurang lengkapnya persyaratan permohonan ijin- ijin.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah guna meningkatkan kapasitas pegawai perlu dilakukan bimbingan, motivasi, inovasi yang tinggi untuk mendukung itu diperlukan diklat dan kursus ilmu tehnologi modern, serta untuk meningkatkan pelayanan sangat diperlukan infrastruktur sarana dan prasarana yang cukup guna menunjang kelancaran kerja.

## D. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis dalam penyusunan prioritas tahun yang direncanakan:

- a. Perlu adanya tuntutan untuk melaksanakan perubahan tata kelola pemerintahan dengan tersedianya Sumber Daya Manusia yang berpotensi.
- b. Perlu adanya pendeklegasian kewenangan yang dapat dilakukan oleh Kecamatan, walaupun sebenarnya sudah ada kewenangan yang bersifat aktributif tetapi masih perlu diikuti kewenangan delegatif.
- c. Perlu adanya arah kebijaksanaan yang jelas terhadap pengembangan dan penataan wilayah terutama pada titik-titik pembangunan wilayah sesuai dengan pengembangan dan peruntukannya.
- d. Perubahan fungsi lahan yang sangat pesat mengingat Kecamatan Denpasar Selatan merupakan daerah pengembangan kawasan perkotaan yang mengalami perkembangan sangat pesat sehingga perlu inovasi baru dalam penanganannya dengan tehnologi yang ada.

- e. Infrastruktur sarana dan prasarana yang ada masih belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan sehingga masih perlu untuk ditingkatkan pembangunannya.
- f. Peluang kerja dan lapangan kerja yang ada cukup banyak tetapi tidak diimbangi dengan keahlian dan ketrampilan bagi calon pencari kerja, sehingga perlu adanya diklat bagi calon pencari kerja.
- g. Angka kemiskinan di Kecamatan Denpasar Selatan masih cukup tinggi dan masih perlu penangan yang serius, sehingga pendampingan dari stakeholder sangat diharapkan baik bimbingan, pelatihan dan penguatan modal usaha bagi KK misk

## **BAB. III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam penyusunan perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota serta seluruh stakeholders untuk mendapatkan suatu input rencana pembangunan prioritas yang bertitik tolak dari permasalahan serta hambatan-hambatan yang ada, dalam pengembangan rencana program di daerah diperlukan harmonisasi terkait penyelenggaraan pembangunan untuk sinergitas antara lembaga pusat dan daerah.

Kecamatan Denpasar Selatan sebagai perangkat daerah Kota Denpasar memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Denpasar Selatan di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Denpasar Selatan yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Denpasar Selatan telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Ranwal Renja Perangkat Daerah**

Untuk mewujudkan hal tersebut di Tahun 2025 nanti, diperlukan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Denpasar beserta seluruh lapisan masyarakat Kota Denpasar sehingga cita-cita Pembangunan Denpasar

dapat tercapai, maka Tujuan dan sasaran Ranwal Renja merupakan suatu penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan yang bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, yang akan menjadi arah perjalanan pemerintah namun berdasarkan pada kriteria-kriteria dan kewenangan yang mudah dipahami seluruh masyarakat.

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
				2025
1	<i>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan</i>	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	100%
		Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	100%
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yg Dibina	100%

### 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program / kegiatan dalam tahun 2025 guna mencapai visi dan misi Walikota bahwa Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar telah menetapkan tujuan dan sasaran guna meningkatkan perkembangan Kecamatan Denpasar Selatan.

Rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan sekretariat Kecamatan Denpasar Selatan.

Adapun Program dan Kegiatan Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3  
 Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025  
 dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
 Kota Denpasar

Kecamatan Denpasar Selatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Catatan
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kecamatan Denpasar Selatan	<b>Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
a.	<b><i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>	Kecamatan Denpasar Selatan	<b><i>Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>	
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Denpasar Selatan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	
b.	<b><i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i></b>	Kecamatan Denpasar Selatan	<b><i>Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i></b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Denpasar Selatan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan ASN	
c.	<b><i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>	Kecamatan Denpasar Selatan	<b><i>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>	
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Denpasar Selatan	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Denpasar Selatan	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Denpasar Selatan	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	
-	Penyediaan Bahan Logistik	Kecamatan Denpasar Selatan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Denpasar Selatan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	

-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Denpasar Selatan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	
<b>d.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>Kecamatan Denpasar Selatan</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Denpasar Selatan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Denpasar Selatan	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang siap Pakai	
<b>e.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Denpasar Selatan</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Denpasar Selatan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Denpasar Selatan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
<b>f.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Denpasar Selatan</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah</b>	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Denpasar Selatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Denpasar Selatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Denpasar Selatan	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kecamatan Denpasar Selatan</b>	<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat</b>	
<b>a.</b>	<b>Koordinasi Penyele.nggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Denpasar Selatan</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi di tingkat Kecamatan</b>	
-	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Denpasar Selatan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	
-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Denpasar Selatan	Terlaksananya Kegiatan Lomba PSN, PKK dan posyandu	

<b>b.</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kecamatan Denpasar Selatan	<b>Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat</b>	
-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Kecamatan Denpasar Selatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kecamatan Denpasar Selatan	<b>Percentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah</b>	
<b>a.</b>	<b>Pemberdayaan Kelurahan</b>	Kecamatan Denpasar Selatan	<b>meningkatnya persentase pembangunan daerah</b>	
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Denpasar Selatan	usulan masyarakat yang akomodir di Kelurahan	
-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Denpasar Selatan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	
-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Denpasar Selatan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kecamatan Denpasar Selatan	<b>Percentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	
<b>a.</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</b>	Kecamatan Denpasar Selatan	<b>Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</b>	
-	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Denpasar Selatan	Jumlah Pendataan Penduduk yang dilaksanakan, Jumlah Patroli Lingkungan yang dilaksanakan	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kecamatan Denpasar Selatan	<b>Percentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan</b>	
<b>a.</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Kecamatan Denpasar Selatan	<b>Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan</b>	
-	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Denpasar Selatan	Terlaksananya Kegiatan Hut RI dan Hut Kota Denpasar	

-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Denpasar Selatan	Terlaksananya Koordinasi antar Kecamatan	
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kecamatan Denpasar Selatan	<b>Percentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan</b>	
a.	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Kecamatan Denpasar Selatan	<i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa</i>	
-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan penayagunaan Aset Desa	Kecamatan Denpasar Selatan	Terlaksananya Evaluasi RAPBDes	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan sekretariat Kecamatan Denpasar Selatan.

Rencana kerja Kecamatan Denpasar Selatan dalam Tahun 2025 tetap mengacu pada Sasaran dan Tujuan yang telah di tetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar maupun Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Untuk mencapai sasaran dan Tujuan yang sebagaimana yang telah ditetapkan.

Adapun Rencana Kerja yang akan di lakukan oleh Kecamatan Denpasar Selatan pada Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Usulan Kegiatan Yang akan dilaksanakan dalam TA. 2025**  
**Oleh Kecamatan Denpasar Selatan**

#### **Kecamatan Denpasar Selatan**

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targert Capaian Kineja	Pagu Indikatif 2025 (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2025 (Rp.)
1					2	3	4	5	6
7					URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN				
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	16,302,774,475	16,302,774,475
7	01	01	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	13,898,572,291	13,898,572,291
7	01	01	02.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	13,898,572,291	13,898,572,291

7	01	01	02.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	-
7	01	01	02.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Percentase Pemenuhan Saran dan Prasarana Kantor</b>	<b>100%</b>	<b>398,088,400</b>	<b>398,088,400</b>
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5,676,000	5,676,000
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	303,866,500	303,866,500
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	1 paket	88,435,900	88,435,900
7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	13.920.000	13.920.000
7	01	01	02.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>101,300,000</b>	<b>101,300,000</b>
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	101,300,000	101,300,000
7	01	01	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,369,643,784	1,369,643,784

7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	160,200,000	160,200,000
7	01	01	02.08	02	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	-	-
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,209,443,784	1,209,443,784
7	01	01	02.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>535,170,000</b>	<b>535,170,000</b>
7	01	01	02.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45,860,000	45,860,000
7	01	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	14 Unit	187,280,000	187,280,000
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	87,030,000	87,030,000
7	01	01	02.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	215,000,000	215,000,000

7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan</b>	<b>83%</b>	<b>255,519,250</b>	<b>255,519,250</b>
7	01	02	02.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Survey Kepuasan Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>213,713,250</b>	<b>213,713,250</b>
7	01	02	02.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrencam)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	48,350,250	48,350,250
7	01	02	02.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	165,363,000	165,363,000
7	01	02	02.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Survey Kepuasan Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>41,806,000</b>	<b>41,806,000</b>
7	01	02	02.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (PATEN Dll)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	41,806,000	41,806,000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>58,545,000</b>	<b>58,545,000</b>
7	01	04	02.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Kasus yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>58,545,000</b>	<b>58,545,000</b>

7	01	04	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	58,545,000	58,545,000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>177,078,150</b>	<b>177,078,150</b>
8	01	05	02.01		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>177,078,150</b>	<b>177,078,150</b>
9	01	05	02.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantaopkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	162,378,150	162,378,150
9	01	05	02.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	14,700,000	14,700,000
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA</b>	<b>persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>15,825,000</b>	<b>15,825,000</b>
8	01	06	02.01		<b>Failitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa Yang Dapat Pembinaan dan Pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>15,825,000</b>	<b>15,825,000</b>

Ranwal Renja Kecamatan Denpasar Selatan 2025

9	01	06	02.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	15,825,000	15,825,000
Total								16,809,741,875	16,809,741,875

### Kelurahan Pedungan

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targert Capaian Kineja	Pagu Indikatif 2025 (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2025 (Rp.)
1					2	3	4	5	6
7					URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN				
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1,963,500,000	1,963,500,000
7	01	01	02.06			Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100%	194,000,000	194,000,000
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3,500,000	3,500,000
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	155,000,000	155,000,000
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	25,000,000	25,000,000
7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	10,500,000	10,500,000

Ranwal Renja Kecamatan Denpasar Selatan 2025

7	01	01	02.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	60,000,000	60,000,000
7	01	01	02.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1,407,000,000</b>	<b>1,407,000,000</b>
7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	55,000,000	55,000,000
7	01	01	02.08	02	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	2,000,000	2,000,000
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,350,000,000	1,350,000,000
7	01	01	02.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>302,500,000</b>	<b>302,500,000</b>
7	01	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	14 Unit	90,000,000	90,000,000
	01	01	02.10	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2,500,000	2,500,000

7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	180,000,000	180,000,000
7	01	01	02.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	30,000,000	30,000,000
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>842,600,000</b>	<b>842,600,000</b>
7	01	03	02.02		<b>Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>842,600,000</b>	<b>842,600,000</b>
7	01	03	02.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	2,600,000	2,600,000
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	350,000,000	350,000,000
7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	490,000,000	490,000,000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>195,000,000</b>	<b>195,000,000</b>
7	01	04	02.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Kasus yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>195,000,000</b>	<b>195,000,000</b>

7	01	04	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	195,000,000	195,000,000
Total								3,001,100,000	3,001,100,000

## Kelurahan Sesetan

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targert Capaian Kineja	Pagu Indikatif 2025 (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2025 (Rp.)
1				2	3	4	5	6
7				URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN				
7	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7	01	01	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
7	01	01	02.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	-
7	01	01	02.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-
7	01	01	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2,702,000.00
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	102,269,500.00
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	1 paket	24,185,300.00
7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	10,440,000.00

7	01	01	02.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	-	-
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	-
7	01	01	02.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1,536,526,336</b>	<b>1,536,526,336</b>
7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	78,000,000.00	78,000,000.00
7	01	01	02.08	02	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	9,000,000.00	9,000,000.00
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,449,526,336.00	1,449,526,336.00
7	01	01	02.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>91,720,000</b>	<b>91,720,000</b>
7	01	01	02.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	-	-
7	01	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	14 Unit	67,460,000.00	67,460,000.00
	01	01	02.10	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	-	-
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20,000,000.00	20,000,000.00
7	01	01	02.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	4,260,000.00	4,260,000.00

7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan	83%	-	-
7	01	02	02.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Survey Kepuasan Masyarakat	100%	-	-
7	01	02	02.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrencam)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	-	-
7	01	02	02.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	-	-
7	01	02	02.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Survey Kepuasan Masyarakat	100%	-	-
7	01	02	02.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (PATEN Dll)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	-	-
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah</b>	100%	731,706,150	731,706,150
7	01	03	02.02		<b>Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah</b>	100%	731,706,150	731,706,150
7	01	03	02.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	2,971,950.00	2,971,950.00
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	350,000,000.00	350,000,000.00
7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	378,734,200.00	378,734,200.00
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	100%	207,529,600	207,529,600
7	01	04	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100%	207,529,600	207,529,600

7	01	04	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	207,529,600.00	207,529,600.00
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan</b>	<b>100%</b>	-	-
8	01	05	02.01		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100%	-	-
9	01	05	02.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	-	-
9	01	05	02.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	-	-
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA</b>	<b>persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan</b>	<b>100%</b>	-	-
8	01	06	02.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Percentase Desa Yang Dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%	-	-
9	01	06	02.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	-	-
<b>Total</b>								<b>2,707,078,886</b>	<b>2,707,078,886</b>

## Kelurahan Serangan

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targert Capaian Kineja	Pagu Indikatif 2025 (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2025 (Rp.)
1					2	3	4	5	6
7					URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN				
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1,329,729,000	1,329,729,000
7	01	01	02.06			Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100%	176,229,000	176,229,000
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3,789,000	3,789,000
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	130,000,000	130,000,000
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	1 paket	32,000,000	32,000,000
7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	10,440,000	10,440,000
7	01	01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	35,000,000	35,000,000
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasrama Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	35,000,000	35,000,000

7	01	01	02.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>956,000,000</b>	<b>956,000,000</b>
7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	55,000,000	55,000,000
7	01	01	02.08	02	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,000,000	1,000,000
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	900,000,000	900,000,000
7	01	01	02.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>162,500,000</b>	<b>162,500,000</b>
7	01	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	14 Unit	90,000,000	90,000,000
	01	01	02.10	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2,500,000	2,500,000
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30,000,000	30,000,000
7	01	01	02.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	40,000,000	40,000,000
7	01	03			<b>PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>837,685,000</b>	<b>837,685,000</b>

7	01	03	02.02		Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100%	837,685,000	837,685,000
7	01	03	02.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	2,685,000	2,685,000
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	385,000,000	385,000,000
7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	450,000,000	450,000,000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Percentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>190,000,000</b>	<b>190,000,000</b>
7	01	04	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Percentase Kasus yang ditangani	100%	190,000,000	190,000,000
7	01	04	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	190,000,000	190,000,000
Total								2,357,414,000	2,357,414,000

## Kelurahan Panjer

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targert Capaian Kineja	Pagu Indikatif 2025 (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2025 (Rp.)
1				2	3	4	5	6
7				<b>URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>				
7	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1,257,960,939	1,257,960,939

<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>02.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Percentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>100%</b>	<b>201,159,063</b>	<b>201,159,063</b>
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4,941,000	4,941,000
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	158,081,163	158,081,163
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	24,561,900	24,561,900
7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	13,575,000	13,575,000
7	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>02.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	-	-
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	-
7	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>02.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>822,141,876</b>	<b>822,141,876</b>
7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	63,000,000	63,000,000

7	01	01	02.08	02	Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	525,000	525,000
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	758,616,876	758,616,876
7	01	01	02.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>234,660,000</b>	<b>234,660,000</b>
7	01	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	14 Unit	53,730,000	53,730,000
	01	01	02.10	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	15,000,000	15,000,000
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	-	-
7	01	01	02.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	165,930,000	165,930,000
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>897,425,300</b>	<b>897,425,300</b>
7	01	03	02.02		Pemberdayaan Kelurahan	<b>Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>897,425,300</b>	<b>897,425,300</b>
7	01	03	02.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	1,730,000	1,730,000
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	371,000,000	371,000,000

7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	524,695,300	524,695,300
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Percentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>231,359,660</b>	<b>231,359,660</b>
7	01	04	02.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Percentase Kasus yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>231,359,660</b>	<b>231,359,660</b>
7	01	04	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	231,359,660	231,359,660
<b>Total</b>								<b>2,386,745,899</b>	<b>2,386,745,899</b>

## Kelurahan Renon

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targert Capaian Kineja	Pagu Indikatif 2025 (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2025 (Rp.)
1					2	3	4	5	6
7					<b>URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>				
7	01	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Percentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>1,331,447,000</b>	<b>1,331,447,000</b>
7	01	01	02.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Percentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor</b>	<b>100%</b>	<b>130,959,000</b>	<b>130,959,000</b>
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2,043,000	2,043,000

7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	95,774,000	95,774,000
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	1 paket	21,658,000	21,658,000
7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	11,484,000	11,484,000
7	01	01	02.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>104,400,000</b>	<b>104,400,000</b>
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	104,400,000	104,400,000
7	01	01	02.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>992,822,000</b>	<b>992,822,000</b>
7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	83,160,000	83,160,000
7	01	01	02.08	02	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	33,877,000	33,877,000
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	875,785,000	875,785,000

7	01	01	02.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Percentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>103,266,000</b>	<b>103,266,000</b>
7	01	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	14 Unit	62,642,000	62,642,000
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10,000,000	10,000,000
7	01	01	02.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	30,624,000	30,624,000
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Percentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>881,807,000</b>	<b>881,807,000</b>
7	01	03	02.02		<b>Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya Percentase Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>881,807,000</b>	<b>881,807,000</b>
7	01	03	02.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	2,524,000	2,524,000
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasrama Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	385,124,000	385,124,000
7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	494,159,000	494,159,000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Percentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>244,784,000</b>	<b>244,784,000</b>
7	01	04	02.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Percentase Kasus yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>244,784,000</b>	<b>244,784,000</b>

7	01	04	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	244,784,000	244,784,000
Total								2,458,038,000	2,458,038,000

## Kelurahan Sanur

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targert Capaian Kineja	Pagu Indikatif 2025 (Rp.)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2025 (Rp.)
1					2	3	4	5	6
7					URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN				
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1,345,483,060	1,345,483,060
7	01	01	02.06			Persentase Pemenuhan Saran dan Prasarana Kantor	100%	155,349,700	155,349,700
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3,020,500	3,020,500
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	115,493,000	115,493,000
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	1 paket	26,396,200	26,396,200

7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	10,440,000	10,440,000
7	01	01	02.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>71,000,000</b>	<b>71,000,000</b>
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	71,000,000	71,000,000
7	01	01	02.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1,005,659,360</b>	<b>1,005,659,360</b>
7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	65,100,000	65,100,000
7	01	01	02.08	02	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,480,000	1,480,000
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	939,079,360	939,079,360
7	01	01	02.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>113,474,000</b>	<b>113,474,000</b>
7	01	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	14 Unit	70,134,000	70,134,000

	01	01	02.10	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	1,380,000	1,380,000
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20,000,000	20,000,000
7	01	01	02.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	21,960,000	21,960,000
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>646,596,050</b>	<b>646,596,050</b>
7	01	03	02.02		<b>Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>646,596,050</b>	<b>646,596,050</b>
7	01	03	02.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	1,438,000	1,438,000
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	350,000,000	350,000,000
7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	295,158,050	295,158,050
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>175,750,200</b>	<b>175,750,200</b>
7	01	04	02.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Kasus yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>175,750,200</b>	<b>175,750,200</b>
7	01	04	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	175,750,200	175,750,200
<b>Total</b>								<b>2,167,829,310</b>	<b>2,167,829,310</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Ranwal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Ranwal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Ranwal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Ranwal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan.

Dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Denpasar Selatan melaksanakan 6 (enam) program dengan 12 (Dua belas) kegiatan dan 28 (Dua puluh delapan) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 31.901.757.970,-

Rencana Rancangan Program Kerja Kecamatan Denpasar Selatan ini merupakan program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Selatan pada periode tahun 2025. Rencana Program ini hanya merupakan program Kecamatan Denpasar Selatan, sedang pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan Kecamatan di Kota Denpasar. Dengan demikian, Rencana Program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses Kecamatan Denpasar Selatan dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

Denpasar, 08 Desember 2023

Camat Denpasar Selatan

Kota Denpasar



I Made Sumarsana, SE.,M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19660323 198603 1 010